

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori dan konsep	6
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	6
2. Pengertian PSAP.....	6
3. Basis Akuntansi	6
4. Kebijakan Akuntansi	7
5. Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	7
6. Laporan Realisasi Anggaran.....	11
7. Akuntansi Anggaran	12
8. Akuntansi Pendapatan-LRA	13
9. Laporan Operasional.....	16
10. Sumber-sumber Pendapatan	19
2.2 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Pemikiran	21
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Data Primer.....	22
2. Data Sekunder.....	23
3. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
4.1 Gambaran Umum	25

1.	Sejarah Instansi.....	25
2.	Visi dan Misi	27
3.	Program Kerja.....	28
4.	Pengolaan Data	29
5.	Pelayanan Jasa.....	32
6.	Pemeliharaan	32
7.	Koordinasi/Kerjasama	34
8.	Tugas Administrasi.....	34
9.	Tugas Tambahan.....	34
10.	Sruktur Organisasi	34
11.	Fungsi Masing-masing Bidang di BMKG Manado.....	35
12.	Kepala Sup Bagian Tata Usaha	36
13.	Kepala Seksi Observasi dan Informasi	37
14.	Klompok Pemikiran.....	38
15.	Klompok Aerologi	39
16.	Kelompok Pelayanan	39
17.	Kelompok Administrasi.....	41
18.	Kelompok Teknisi.	41
19.	Kelompok Komunikasi.....	43
4.2	Aktivitas Pendapatan di BMKG Sam Ratulangi Manado Berdasarkan PP No 24/2005	44
4.3	Kajian Akuntansi Pendapatan Terhadap Penerapan PP No 71/2010	49
BAB V	Kesimpulan dan Rekomendasi	
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Rekomendasi	53
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbitnya Peraturan (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lain tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, melainkan terjadi pada negara-negara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan timbulnya demokratisasi terhadap pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus tuntutan ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang Administrasi Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN. pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atas revisi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005, SAP digunakan sebagai standar dalam penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atau laporan kinerja oleh Pemerintah maupun Lembaga Pemerintahan. Lingkup penerapan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas menuju akrual pada Laporan Realisasi Anggaran berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis Akrual. Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado yang mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pemantawan cuaca.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai stasiun yang berhak dalam Perumusan kebijakan nasional di bidang pemantauan khususnya cuaca.

Salah satu karakteristik organisasi sektor publik yaitu sumber pendapatan, dimana pendapatan operasionalnya berasal dari instansi lain, dan masyarakat yang berwujud Penyewaan dan penjualan data hasil pengamatan, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Indra Bastian (2010:11). Sebagai bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan setiap kementerian negara atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifikan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan itu tidak boleh digunakan langsung untuk pembiayaan dan harus di setor ke Kantor pusat pada akhir bulan.

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada Masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik, namun pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika belum sepenuhnya menerapkan PP No 71/2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perlakuan akuntansi pendapatan di organisasi sektor publik khususnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru

mengenai lembaga pemerintahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan untuk penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Operasional berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi Pendapatan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan operasional sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado merupakan Stasiun yang mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengolahan data, dan pelayanan jasa, dalam menunjang tugas pelaksanaan utama Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado, melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerja kordinasi, administrasi dan tugas tambahan, maka Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya belum sepenuhnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal inilah melatarblakangi penulis dalam melakukan Penulisan tugas akhir yang berjudul ***Kajian Akuntansi Pendapatan Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado.***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru mengenai lembaga pemerintahan atas implementasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan untuk penyajian Laporan Keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlakuan akuntansi atas Pendapatan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menurut PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

1. Apakah Akuntansi Pendapatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi manado mengacu pada ketentuan PP No. 71 dapat diterapkan secara penuh atau tidak?
2. Bagaimanakah perbedaan Akuntansi Pendapatan menurut PP No 24/2005 dan PP No. 71/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kajian Akuntansi Pendapatan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pada Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado.

1. Untuk mengetahui pendapatan setelah penerapan PP No. 71 pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulang Manado.
2. Untuk mengetahui perbedaan Akuntansi Pendapatan menurut PP No. 24/2005 dan PP No. 71/2010.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,antara lain:

1. BagiPeneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisa kesiapan sumber daya manusia di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sam Ratulangi Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang akan menggunakan SAP berbasis akrual.